**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI**

**(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BITUNG)**

# C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Logo IAIN baru.jpg

# SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Fakultas Syariah IAIN Manado

Oleh:

**MUH FAHRUDIN H NUGROHO**

NIM. 16.1.1.017/AS

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**MANADO**

**2021**

**KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kita kehidupan dengan segala kenikmatan. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada panutan kita Baginda besar umat Islam yaitu Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung)”**  dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Semoga penelitian skripsi ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dalam menjalankan tugas masing-masing.

Selama proses Perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi sampai selesai memang begitu banyak yang telah membatu, baik dalam dukungan moral maupun materil, oleh karena hal itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado: Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA, M.Res, Ph.D.
2. Wakil Rektor 1 bidang akademik dan pengembangan kelembagaan: Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor 2 bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan: Dr. Radlyah H. Jan, SE, M.Si, Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama: Dr. Musdalifah Dachrud, M.Psi.
3. Dekan Fakultas Syariah: Dr. Hj. Salma, M.HI.
4. Wakil Dekan 1 bidang akademik: Dr. Drs. Naskur, M.HI.
5. Wakil Dekan 2 bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Dr. H. Hasyim Lahilote, SH., MH.
6. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah: Baso Mufti Alwi, SH, M.Ag.
7. Pembimbing I: Dr. Hj. Nenden Herawati Suleman, SH., MH dan Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Aakademik: Dr. H. Hasyim Lahilote, SH., MH.
8. Kepala perpustakaan beserta seluruh staf perpustakaan.
9. Seluruh Civitas Akademika Institut Agama Ialam Negeri Manado
10. Ketua pengadilan Agama Bitung: Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung: Masita Olii, S.HI, para Hakim Pengadilan Agama Bitung, dan seluruh jajarannya
11. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Agus Nugroho Mulyono dan Ibunda Sri Rahayem yang telah menafkahi, menyayangi, serta memberikan bimbingan dan doa restu yang tulus kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi.
12. Adik yang tercinta turut menyemangati dan memberi nasehat-nasehat berharga.
13. Sahabat-sahabat Fakultas Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Angkatan 2016 yaitu Rizal Lahati, Safrullah Ngau, Nazamudin Mahengkeng, Sekar Cahyani, Sekar Larasaty, Bayu Palebo, Bayu Yunus, Farhan Albugis dan teman lainnya sebagai rekan berpikir kritis yang sama-sama berjuang dalam berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan.
14. Sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Bidikmisi IAIN Manado sebagai barometer dalam peningkatan prestasi mahasiswa
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memotivasi, memberikan ide, gagasan, masukan serta informasi kepada peneliti mulai dari penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah diberikan Bapak/Ibu, Saudara(i) kepada peneliti diterima oleh Allah dan dicatat sebagai amal kebajikan. Aamiin.

Manado, Juni 2020

Muh Fahrudin Hanif N

16.1.1.017

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**  i

**DAFTAR ISI**  iv

**ABSTRAK**  vi

**BAB IPENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 7
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

**BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

1. Penelitian Terdahulu 10
2. Pengertian Mediasi 11
3. Dasar Hukum Mediasi 13
4. Prinsip-prinsip Mediasi 14
5. Mediasi dalam Konflik 18
6. Peran dan Fungsi Mediator 23
7. Prosedur Mediasi 31
8. Jenis Perkara Mediasi 36
9. Manfaat Mediasi 37

**BAB II METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 41
2. Metode Pendekatan 42
3. Metode Pengumpulan Data 42
4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 44

**BAB IV. HASIL PENELITIAN**

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bitung 46
2. Proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bitung 49
3. Faktor Penghambat serta Gagalnya Proses mediasi 52
4. Tingkat Keberhasialan Mediasi Di Pengadilan Agama Bitung 56

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# ABSTRAK

**Nama Penyusun : La Ade**

**NIM : 15.1.1.022**

**Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi(Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung)**

**Judul Skripsi :**

**Keywords : Analisis, Mediasi, Pengadilan Agama Bitung**

Skripsi dijelaskan tentang Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi dengan studi kasusnya berlokasi di Pengadilan Agama Biting, dibuat dengan tujuan dan harapan untuk mengetahui bagaimana Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung, serta untuk menganalisa bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan sistem analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Bitung telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak serta memudahkan bagi para pihak untuk mengurus mediasi. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah ego para pihak yamg mengutamakan hak pribadi. Selain itu kurangnya Hakim Mediator yang menangani proses mediasi. Sementara tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah.

Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukan adanya penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Kemudian disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan demi terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia saling bergantung satu sama lain, dengan adanya hubungan saling bergantung ini menyebabkan perkembangan yang signifikan di segala aspek disetiap induvidunya dan dibalik perkembangan pastinya akan adanya konflik dan konflik terbentuk adanya kebentingan yang berbeda.[[1]](#footnote-1)

Manusia merupakan makhluk yang lemah dibanding makhluk yang lain namun memiliki kelebihan intelektual dibandingkan dengan makhluk lainnya, dengan adanya kelebihan itu manusia mampu untuk bertahan hidup dan mengelola setiap aspek lingkungan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola pikir manusia berkembang begitu cepat dibandingkan perkembangan lingkungan yang mendukungnya, sehingga lambat laun kesimbangan itu menjadi rusak baik antara manusia dengan manusia serta manusia dan lingkungan dan keterlambatan itu mengganggu interaksi sosial kemudian menimbulkan gejala yang mengkhawatirkan karena interaksi antar induvidu dengan lingkungan menjadi tidak terkontrol.

Perselisihan, pertentangan hingga perdebatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia sebagai bentuk untuk mempertahankan pendirian serta pengakuan demi mencapai sebuah kepentingan. Perilaku yang *kontra produktif* semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing induvidu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya diplomasi, negosiasi maupun dengan dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum *litigasi*.[[2]](#footnote-2)

Islam sendiri mengajarkan melakukan musyawarah atau saling komunikasi antara pihak yang berselisih agar memperoleh jalan damai. komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasandan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian penting dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Khususnya diantara sesama muslim. Allah berfirman dalam (Qs. Al-Hujurat/49:9-10)

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahan:

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.[[3]](#footnote-3)

Salah satu upaya manusia dalam menangani permasalahan dilakukan aturan mengenai pendamaian yaitu mediasi. Mediasi ini diataur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada huruf (a) bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.[[4]](#footnote-4) PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan *(litigasi)*, tetapi harus terlebih dahulu harus mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.[[5]](#footnote-5)

Mediasi merupakan sebuah upaya untuk mencapai proses damai sesuia yang tertuang dalam hukum acara yang tertuang dalam Pasal 130 HIR *(Het Herziene Indonesische Reglement)* atau Pasal 154 Rbg *(Rechtreglement Buiten Gewesten)*.[[6]](#footnote-6) Ditegaskan pula dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu tentang semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi, dan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila tidak menempuh prosedur mediasi.[[7]](#footnote-7)

Pelaksanaan mediasi terdapat bagian penting yaitu dalam perumusan mediasi terdapat tolak ukur keberhasilan mediasi, yaitu apabila para pihak yang berperkara bersedia secara sukarela berdamai dan selanjutnya mencabut perkaranya. Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat proaktif melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadi salah satu bagian hukum acara yang tidak bisa terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti membaca gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan lain sebagainya.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menunjukan kurangnya efektif dalam mencapai tujuan dari mediasi karena hal tersebut Mahkamah Agung mulai menyadari terdapat kendala-kedala yang terjadi dalam implementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 seperti tidak adanya kewajiban kehadiran para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lainnya, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil seperti yang diharapkan, hal ini juga terjadi karena tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menghadiri proses mediasi.[[8]](#footnote-8)

Berbagai kendala dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perlu pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam proses mediasi. Berdasarkan permasalahan itu Mahkamah Agung melakukan penelitian dan pengkajian tentang kelemahan-kelemahan dari PERMA sebelumnya dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah tertanam dalam pemahaman masyarakat. Pengembangan sistem mediasi agar maksimal sesuai harapan, haruslah dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan terkenal di indonesia.

Setelah pengkajian lebih lanjut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya pempercepat, mempermurah, dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses lebih besar dan luas bagi para pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen peradilan yang efektiv untuk mengatasi penumpukan perkara dipengadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara secara damai.

Perbaikan PERMA bukan hanya sekedar pempercepat, mempermurah, dan mempermudah proses penyelesaian sengketa juga memperbaiki bagaimana jalannya proses mediasi yang dimana hal tersebut merupakan hal krusial dan proses tersebut diharuskan bagi pengadilan untuk memenuhi aturan tersebut demi meningkatkan keberhasilan serta memperoleh hasil yang diharapkan oleh Perma itu sendiri.

Pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan mampu untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan mediasi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi perkara yang dihadapi serta manfaat yang bisa diperoleh jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan, tetapi fakta lapangannya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Bentuk upaya untuk mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian perkara, para hakim di Pengadilan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang berperkara untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara. Mediasi juga perlu dimaksimalkan dalam penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.[[9]](#footnote-9)

Penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu lama dan berlarut-larut, yang meliputi tahapan dan prosedur persidangan dimulai pendaftaran gugatan dan dilanjutkan penentuan hakim kemudian proses pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan,[[10]](#footnote-10) proses penyelesaian juga terlalu formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga akses untuk memperoleh keadilan tidak cepat.[[11]](#footnote-11)

Adanya mediasi di pengadilan yang merupakan proses dalam peradilan, masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara maupun kehendak para pihak itu sendiri, selain sebagai instrumen efektif mengatasi beban perkara, mediasi merupakan kesukarelaan serta membantu bukan membebani para pihak dan waktu proses berperkara tidak terbuang sia-sia untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

1. **Rumasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dapat ditarik pokok masalah salah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bitung?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung?
3. **Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**
4. Definisi Operasional
5. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[[12]](#footnote-12)

1. Tingkat

Tingkat yaitu batas waktu (masa), sepadan suatu peristiwa (proses, kejadian, dan sebagainya), babak(an), tahap, perundingan sudah sampai pada yang terakhir.[[13]](#footnote-13)

1. Keberhasilan

Keberhasilan yaitu perihal (keadaan) berhasil[[14]](#footnote-14), dan berhasil itu sendiri maksudnya adalah mendatangkan hasil, adanya hasil.[[15]](#footnote-15)

1. Mediasi

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[[16]](#footnote-16)

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka perlu dibuatkan batasan dan cakupannya. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu menganalisis tentang peningkatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung pada tahun 2019 sehingga dalam analisis tersebut mampu mengetahui kemajuan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung. Adapun cakupan penelitian ini adalah Perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Bitung di Jl. Stadion 2 Saudara, Kel Manembo-nembo tengah, Kec Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

1. **Tujuan dan Kegunaan**
2. Tujuan Penelitian
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bitung.
4. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mesiasi di Pengadilan Agama Bitung.
5. Kegunaan penelitian
6. Secara teori peneliti mengharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dalam hukum perdata, khususnya mengenai mediasi. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.
7. Secara praktik peneliti berharap penelitian ini dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.

**BAB II**

**TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

1. **Penelitian Terdahulu**

Adapun yang berkaitan dengan tulisan ini, peneliti mengambil contoh bebetapa yang berkaitan dengan judul ini akan tetapi mempunyai letak pebedaan yang akan di sajikan peneliti.

Skripsi dari Wildan Ubaidillah Al-Anshori: “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengn Rumusan Masalahnya:

1. Bagaimana efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana pengaruh hakim mediator tentang keberhasilan pengislahan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang?

Adapun yang membedakan peneliti dengan judul ini yaitu berkaitan dengan lokasi penelitiannya, dalam rumusan masalahnya, serta bentuk penyajiannya serta penelitian ini lebih mengarah ke tingkat keberhasialn sebuah mediasi berfokus pada pengaruh hakim. Berbeda dengan peneliti yang analisis mengenai keberhasilan mediasi.

Skripsi dari M. Rizal Abdul Majid: “Efektifitas Mediasi Hakim Di Pengadilan Agama Surakarta Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Dengan rumusan masalahnya:

1. Bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Bagaimana efektivitas penerapan mediasi hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008

Adapun yang membedakan peneliti dengan judul ini yaitu berkaitan dengan lokasi penelitiannya, dalam rumusan masalahnya, serta menitik beratkan keberhasilan mediasi hanya pada hakim.

Skripsi dari Arif Muslim: “Efektifitas Mediasi Pasca PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dengan rumusan masalahnya:

1. Bagaimana penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca diberlakukan Perma No. 1 Tahun 2016 dan Hukum Islam?
2. Bagaimana efektivitas mediasi pasca Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang

Adapun yang membedakan peneliti dengan judul ini yaitu berkaitan dengan lokasi penelitiannya, dalam rumusan masalahnya, serta menitik beratkan pengaruh pasca PERMA No 1 Tahun 2016 pada keberhasilan mediasi di pengadilan.

1. **Pengertian Mediasi**

Secara etimologi mediasi, berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang menggambarkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan *(trust)* dari para pihak yang berperkara.[[17]](#footnote-17)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Definisi mediasi secara terminologi banyak di kemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu Menurut Garry Goopaster,memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasipemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak *(impartial)* bekerja sama dengan pihak yang berperkara untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.[[18]](#footnote-18)

Menurut Joni Emerzon, mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dantidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.[[19]](#footnote-19)

Menurut Syahril Abbas seperti yang dikutip oleh Rahmad, menjelaskan bahwa, mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga (mediator) yang menjembatani para pihak besengketa untuk menyelesaikan perselisihan.[[20]](#footnote-20)

1. **Dasar Hukum Mediasi**

Ada pun aturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk menerapkan mediasi di pengadilan yaitu:

1. HIR Pasal 130 dan RBg 154 BW ayat (1): jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua menciba mendamaikan mereka. Ayat (2); jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu) surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Ayat (3) keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding. Ayat (4); jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu.
2. KUH Perdata BAB XVII Bagian 4 Pasal 1851-1864[[21]](#footnote-21)
3. Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU Nomor50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
4. **Prinsip-prinsip Mediasi**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

PertamaMediasi wajib ditempuh, sebelum perkara diputus oleh hakim para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah perkara langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Kedua, otonomi para pihak. Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *self determination,*yaitu para pihaklah yang berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.

Ketiga, mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian perkara melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan perkara.

Keempat, Efisiensi Waktu. Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah perkara atau perkara. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6).

Kelima, sertifikasi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada asasnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keenam, Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Ketujuh, kerahasiaan. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada asasnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para pihak.

Kedelapan, pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan- pertemuan atau sesi-sesi mediasi.

Kesembilan, pengulangan mediasi. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa.

Kesepuluh, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau perkara perdata yang telah diajukan ke pengadilan.

Ada beberapa tokoh yang mengungkapkan mengenai prinsip-orinsip mediasi misalnya prinsip dari David Spencer dan Michael Brogan yang merujuk pada pandangan Ruth Carton tentang lima prinsip dasar mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan *(confidentiality)*, prinsip sukarela *(volunteer)*, prinsip pemberdayaan (*empowerment)*, prinsip netralitas *(neutrality)*, dan prinsip solusi yang unik *(a unique solution)*.[[23]](#footnote-23)

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality.* Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment.* Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalarn hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas *(neutrality).* Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya menfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak. Layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik *(a unique solution).* Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

1. **Mediasi dalam Konflik**

Proses penyelesaian sebuah perkara di pengadilan pasti ada yang menang dan kalah. Kondisi ini merupakan hal yang sulit untuk dibantah karena pada umumnya orang berpendapat demikian terhadap dinamika proses *litigasi* yang terjadi saat ini, apalagi mereka yang pernah mengalami langsung berperkara di pengadilan pasti akan merasakan betapa proses persidangan itu begitu banyak menyita waktu, tenaga, biaya dan pikiran, yang kesemuanya sulit untuk dinilai secara materi. Selain itu hampir pada setiap tahapan sidang selalu memerlukan biaya yang jumlahnya cukup besar, apalagi mereka yang berkedudukan sebagai penggugat karena harus mengeluarkan biaya awal (panjar) untuk membiayai proses penyelenggaraan sidang.

Pihak yang mengajukan gugatan tidak selalu berujung dengan kemenangan namun menjadi ajang judi. Jika gugatannya mampu dibuktikan di Hadapan Hakim mungkin saja gugatannya akan dimenangkan. Namun sebaliknya jika gugatannya tidak dapat dibuktikan atau dianggap tidak beralasan, maka gugatan itu akan ditolak dan penggugat harus menerima kerugian sejumlah biaya panjar yang telah terpakai sebagai ongkos berjalannya perkara.

Pada umumnya orang mengajukan gugatan ke pengadilan karena dipicu oleh gesekan emosional, atau setidak-tidaknya sengketa yang telah dibumbui oleh persoalan-persoalan non hukum. Tidak heran jika banyak yang secara terang-terangan mengakui, bahwa dia telah memperhitungkan nilai materinya, yang penting bisa menumpahkan hasrat ingin puas kepada lawan perkaranya jika dinyatakan kalah atau dihukum oleh putusan pengadilan.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemenangan dalam berperkara adalah hal yang sangat penting. Dengan kemenangan yang diperoleh akan menunjukkan harga diri dan kehormatan pribadinya, walaupun menurut perhitungan ekonomis jelas perbuatan seperti itu sama sekali tidak mendatangkan keuntungan karena nilai gugatan yang diperebutkan sesungguhnya sangat kecil dibandingkan dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan[[24]](#footnote-24)

Untuk mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di peradilan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi padaperkara-perkara perdata. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.

Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhir tidak akan menggunakan prinsip *win or lose*. Kesepakatan yang telah dikuatkan menjadi akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final. Mengikat karena setiap butir-butir yang disepakati dalam akta perdaimaian dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi jika salah satu pihak di kemudian hari mengingkarinya. Sedangkan final berarti bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan para pihak menjadi akta perdamaian, maka tertutup segala upaya hukum yang tersedia bagi para pihak. Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya operasional menjadi jauh lebih murah, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya.

Upaya untuk memberdayakan lembaga perdamaian pada perkara-perkara perdata sangatlah penting mengingat tingginya intensitas penggunaan upaya hukum yang mengakibatkan penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam sengketa perdata para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai peninjauan kembali, bahkan banyak perkara yang objek sengketanya sangat kecil sekalipun tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan waktu yang cukup panjang hanya untuk menyelesaikan satu perkara perdata.

Hal yang mendasari ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan putusan dalam waktu dekat.

Proses pelaksanaan mediasi para pihak akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan serta yang memiliki wawasan terhadap materi perkara dan keterikatan dengan para pihak yang bersengketa. Para pihak selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui kaukus atau pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak, yang mana hal itu sulit dilakukan oleh Hakim yang menyidangkan perkaranya karena akan berbenturan dengan aturan kode etik yang melarang Hakim pemeriksa perkara untuk berkomunikasi dengan salah satu pihak yang berperkara. Disinilah salah satu letak kelebihan proses perdamaian dengan bantuan seorang mediator dibandingkan dengan perdamaian yang difasilitasi oleh Hakim yang menyidangkan perkaranya.

Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena adanya benturan kepentingan. Adanya kalanya individu yang terlebit konflik tidak mampu untuk melakukan *negosiasi* atau menemukan suatu *resolusi* yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti ini akan semakin buruk jika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan akan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing pihak mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu akhirnya kesepakatan sulit dicapai. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa akan menjadi sangat penting ketika ketidakmampuan para pihak dalam menciptakan peluang untuk berdamai akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif.[[25]](#footnote-25)

Proses mediasi seorang mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.[[26]](#footnote-26) Pada umumnya mediator akan melakukan penjajakan dengan memperkenalkan prosedur dan tahapan mediasi, namun perannya tidak lebih sebagai pemacu yang netral dalam proses interaksi para pihak, hal ini umumnya mencakup bahwa mediasi merupakan suatu proses dimana para pihak dengan pacuan mediator menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan setiap penyelesaian.

Pelaksanaan proses mediasi, peranan komunikasi jauh lebih efektif dari pada hanya sekedar tukar-menukar berkas atau catatan. Terciptanya komunikasi dua arah yang saling mengisi dengan saran dan masukan-masukan akan membantu secara tidak langsung dalam mencairkan suasana.

1. **Peran dan Fungsi Mediator**
2. Pengertian Mediator

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri ke dalam sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan memfasilitasi para pihak dalam penyelesaian sengketa itu secara damai, pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan istilah *Mediator*.[[27]](#footnote-27)

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan mediator adalah:

“Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”

Berfokus pada definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk kedalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Kata “netral” selalu dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seorang mediator diantara kedudukan para pihak, lalu sepenting apakah sebenarnya kenetralan posisi mediator dalam proses mediasi.

Netral secara sederhana dapat diartikan bahwa seorang mediator tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan para pihak atau salah satu pihak, namun apakah mutlak harus demikian? Jika dalam salah satu kasus ternyata para pihak sepakat untuk memilih seorang mediator yang masih terikat sanak keluarga dengan salah satu pihak apakah tetap diperbolehkan? Sebenarnya jika kita simak fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi, maka pengertian “netral” lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan yang seimbang/ tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak semata-mata karena kapasitas pribadinya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak, walaupun itu tetap menjadi hal yang penting dan menentukan[[28]](#footnote-28)

PERMA Mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.[[29]](#footnote-29)

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Dalam ayat selanjutnya dikatakan: berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dalam pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung.

Pelaksanaan proses mediasi, seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang berperkara untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya.

1. Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa kreatif dan cerdasnya seorang mediator dalam menciptakan komungkinan proses terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian. Beberapa karakteristik mediator yang efektif antara lain:[[30]](#footnote-30)

1. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan.
2. Pengetahuan tentang materi yang disengketaka.
3. Kemampuan mengekspresikan kemampuan-kemampuan secara verbal.
4. Kemampuan untuk berfikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas).
5. Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, refrase, mensistematisasikan).
6. Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan.
7. Integritas (tidak tercela).
8. Kemampuan mempengaruhi.
9. Sabar.
10. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan diri dari lawan.

Bagi seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan dalam berperkara juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga kosentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketanya, kepentingan-kepentingan lain di luar persoalan pokok sedapat mungkin harus dieliminasi lebih awal sebelum masuk ke dalam pokok perkaranya.

Membentuk pola komunikasi timbal balik secara berimbang akan lebih memudahkan para pihak untuk menyampaikan asumsi-asumsi dan pendapatnya bagi bentuk-bentuk penyelesaian sebagai alternative. Proses tawar-menawar merupakan momentum yang sangat penting bagi jalan menuju kesepakatan, karena disitulah para pihak dapat mengungkapkan kepentingan-kepentingan kritisnya dengan tidak mengesampingkan kepentingan-kepentingan lain.

Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang mediator sebelum memulai tahap mediasi yaitu:

1. Apa yang menjadi latar belakang persoalan.
2. Mengenal siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki kekerabatan di antara para pihak.
3. Apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan oleh penggugat termasuk menyangkut kategori persoalan hukum yang disengketakan, misalnya perbuatan melawan hukum (PMH) ataukah wanprestasi
4. Apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat
5. Fungsi Mediator

Menurut Fuller[[31]](#footnote-31)Mediator memiliki fungsi yaitu:

1. Sebagai Katalisator

Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik teang untuk memperoleh perdamaian, mediator tidak hadir untuk memberikan keputusan dan kesimpulan kepada para pihak, kehadirannya tidak lain yaitu untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak bersama. Pihak-pihak yang bertikai merupakan klien yang harus diberikan motivasi untuk berdamai dan mencoba meredakan ketegangan yang terjadi di antara para pihak. Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan kearah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.

Mediator wajib menumbuhkan banyak ide-ide yang konstruktif bagi terciptanya komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi yang destruktif melalui penyebaran isu-isu menyudutkan yang tidak berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Untuk dapat menelusuri dan menggali kepentingan-kepentingan para pihak dengan berbagai opsi untuk menjadi alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Hanya para pihak yang tahu akan kepentingan dan persoalan yang sebenarnya, sehingga mereka sendiri yang harus pro aktif dalam melakukan penggalian terhadap berbagai kepentingan dan titik persoalan dalam sengketa yang terjadi. Mediator hanya akan menjadi fasilitator dalam memberikan ruang dan merangsang para pihak untuk aktif melakukan komunikasi timbal balik dalam merumuskan kesepakatan damai bagi penyelesaian masalah yang dihadapi.

1. Sebagai Pendidik

Peran mediator akan sangat menentukan dalam keberhasilan proses mediasi. Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik yang mampu memberikan arahan dan nasehat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Cukup penting bagi mediator untuk mengondisikan para pihak agar menyadari akan kekhilafannya.

Mediator dapat mencontohkan sebuah keteladanan yang bisa menyentuh perasaan para pihak, metode komunikasi harus bersifat persahabatan, dan mampu mencairkan suasana agar menghindarkan kesan-kesan yang formal dan kaku. Semakin rileks proses perundingan yang dilakukan, maka akan semakin memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam menyerap setiap alur komunikasi yang dibangun oleh mediator.

1. Sebagai penerjemah

Semua usulan yang diberikan mediator tidak seluruhnya dapat dimengerti oleh para pihak yang sedang terlibat proses perdamaian. Apalagi jika para pihak berasal dari golongan orang yang tidak begitu memahami materi hukum. Dalam kondisi seperti itu seorang mediator harus mampu menerjemahkan setiap konsep yang tidak dimengerti oleh para pihak ke dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti.

1. Sebagai Narasumber

Mediator sebagai narasumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti semua permasalahan, namun setidaknya mediator harus mampu mengelola dan memanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, maka seorang mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang dihadapi. Adakalanya para pihak akan bertanya kepada mediator tentang hal-hal menyangkut prosedur dan tata cara proses perundingan maupun tentang materi pokok dalam sengketa yang terjadi.

1. Sebagai Penyandang Berita Jelek

Menjadi sosok pihak yang berada di tengah-tengah orang yang sedang bersengketa tentunya akan banyak menerima resiko menyangkut datangnya informasi-informasi yang menyudutkan, baik yang bertujuan untuk memancing emosi maupun hanya sekedar sebagai alat untuk menggertak pihak lawan melalui perantaraan mediator. Dalam kaitannya dengan fungsi mediator sebagai penyandang berita jelek, mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yan disampaikan oleh para pihak.

1. Sebagai Agen Realitas

Beberapa tahapan penting harus dilalui oleh seorang mediator, salah satu tahapan itu adalah ketika seorang mediator harus berterus terang tentang kenyataan yang ada. Mediator harus menampung segala bentuk informasi baik yang berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri.

Sebelum melakukan penyaluran informasi secara timbal balik, maka sebaiknya mediator membuat pemilihan-pemilihan terhadap informasi yang diterima, hal yang penting untuk disampaikan harus disampaikan dengan bahasa penyampaian yang lebih baik dan sebaliknya mediator berhak untuk mendominasi informasi provokatif dan tuduhan yang dirasa tidak penting untuk menghindari reaksi negative dari pihak lawan.

1. Sebagai Kambing Hitam

Setiap konsep usulan yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat diakseptasi oleh pihak lawan dengan mudah, namun terkadang menimbulkan penolakan dan ketidakpuasan yang kesemuanya itu bisa ditumpahkan kepada mediator, kondisi seperti ini harus disadari oleh seorang mediator dengan terus berusaha mengubah siasat melalui beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan.

Mediator juga harus menjaga agar dalam proses pinteraksi para pihak tidak terlibat perdebatan kusir yang tidak memiliki fungsi untuk mengakhiri sengketa. Strategi tertentu harus digunakan oleh mediator agar para pihak mau menumpahkan segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.

1. **Prosedur Mediasi**

Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri perkara tanpa harus diadili oleh hakim.[[32]](#footnote-32) Kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah *(winning or losing).* Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang *(win-win solution).* Berdasarkan fakta ini, kesungguhan kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan dapat dikatakan belum efektiv.

Belum efektivitasnya itu bukan semata-mata disebabkan faktor kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim, tetapi lebih didominasi dan peran advokat atau kuasa hukum. Mereka lebih cenderung mengarahkan proses litigasi berjalan terus mulai dari peradilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali, demi mengejar *professional fee* yang besar dan berlanjut.[[33]](#footnote-33)

Prosedur Mediasi di Pengadilan tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 1, dinyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: Mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pasal 2 ayat (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Ayat (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa tahapan prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan Perma Nomor01 tahun 2008 yaitu; tahap pra mediasi dan tahap-tahap proses mediasi.

1. Tahapan Pramediasi[[34]](#footnote-34)
2. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk memenuhi mediasi.
3. Ketidak hadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
4. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
5. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
6. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
7. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam ini Perma kepada para pihak.
8. Tahapan Proses Mediasi
9. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
10. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
11. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
12. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
13. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
14. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

**Bagan Tentang Tahapan Proses Mediasi[[35]](#footnote-35)**

* Pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Negeri / Agama
* Pembayaran Panjar Biaya Perkara dan Penandatanganan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
* Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Oleh Ketua Pengadilan Negeri/Agama
* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Menentukan Hari Sidang dengan Penetapan
* Juru Sita Pengadilan melakukan pemanggilan kepada para pihak (penggugat, tergugat, dan turut tergugat)
* Para Pihak hadir
* Penyampaian proses mediasi oleh Ketua Majelis Hakim
* Para Pihak tidak Hadir
* Dilakukan Pemanggilan Ulang
* Putusan Verstek /
* Putusan Gugal
* Pemilihan Mediator
* Penundaan sidang
* Mediator Mengadakan

pertemuan Awal

* Perkenalan dan penyampaian

informasi tentang Prosedur Mediasi

* Kaukus
* Penyampaian Usulan atau penawaran lain
* Penyampaian dan Pertukaran resume
* Melakukan dialog tentang Kemungkinan penawaran Negosiasi
* Proses Mediasi Gagal
* Penyampaian Dokumen Kesepakatan Damai ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
* Pengukuhan Menjadi Akta perdamaian
* Proses Persidangan Dilanjutkan
* Kesepakatan perdamaian tidak dikukuhkan menjadi Akta perdamaian
* Perkara Dicabut

**Eksekusi**

1. **Jenis Perkara Mediasi**

Jenis perkara wajib menempuh Mediasi, dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan; Semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Ayat (2), Perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Perkara yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
2. Perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
3. Perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Perkara Konsumen;
6. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
7. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
8. Penyelesaian perselisihan partai politik;
9. Perkara yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
10. Perkara lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. **Manfaat Mediasi**

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehinnga sangat tepat bila dijadikan sebuah pilihan, di bndingkan dengan mengikuti persidangan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi yaitu:[[36]](#footnote-36)

1. Proses yang cepat, yakni persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2. Bersifat Rahasia, yakni segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh public dan juga tidak ada pers yang meliput.
3. Tidak mahal, yakni sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah dan juga pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
4. Adil, yakni solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak.
5. Berhasil baik, yakni pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan

Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang berbeda dari litigasi di Pengadilan. Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:[[37]](#footnote-37)

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relative murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan seara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak, kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan.

Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana dikutip oleh Runtung, yaitu:

1. Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi.
2. Penyelesaian secara tepat.
3. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak.
4. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan *customized*.
5. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian maslah secara kreatif.
6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bias diduga.[[38]](#footnote-38)

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode studi kasus. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna[[39]](#footnote-39). Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian secara langsung tentang analisis tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung agar memperoleh hasil yang faktual.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bitung di Jl. Stadion 2 Saudara, Kel Manembo-nembo tengah, Kec Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Alasan pertama mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena tempat ini dulunya merupakan tempat peneliti melakukan Pelatihan Praktik Lapangan sehinnga peneliti telah mengetahui langsung situasi, kondisi, dan objek-objek penelitian guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas. Alasan lain peneliti mengambil lokasi tersebut dengan alasan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Agama Bitung.

1. **Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang menggunakan yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Pelaksanaan penelitian ini peneliti dalam pengumpulan data menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Obsevasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.[[40]](#footnote-40)

Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan kesahihannya (validitasnya).

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[[41]](#footnote-41) Dalam hal ini Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan yaitu hakim mediator Pengadilan Agama Bitung.

1. Dokumentasi

Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan Agama Bitung seperti data perkara yang dimediasi, laporan hasil mediasi, data yang berhasil di mediasi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pembahasan ini, kemudian Peneliti mempelajari, menelaah, dan menganalisa data-data tersebut sehingga penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk mengelolah data terdapat dua proses yaitu:

1. Analisis sebelum lapangan yang dimaksud peneliti yaitu dengan melakukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan unruk menentukan fokus penelitin.[[42]](#footnote-42)
2. Analisis selama dilapangan yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.[[43]](#footnote-43)
3. **Metode Pengolahan Dan Analisis Data**

Melalui tulisan ini peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan metode kualitatif prosesnya yaitu:

1. Analisis sebelum dilapangan, lebih mengarah untuk menganalisa data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang sifatnya sementara dan dapat berkembang ketika peneliti turun ke lapangan.
2. Analisis Selama dilapangan, Setelah memiliki konsep awal peneliti turun ke lapangan untuk melakukan proses penelitian dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mecapai jenuh.[[44]](#footnote-44)

Pengolahan data perlu melewati beberapa langkah agal memperoleh hasil yang lebih tervefikasi dan teranalisis, yaitu:

1. Editing

Pelaksanaan penelitian ini mengumpulkan bebagai berkas-berkas, catatan, informasi untuk memperoleh data, agar data tersebut dapat di analisis agar memperoleh data yang lebih valid.

1. Klasifikasi

Langkah ini merupakan bentuk mengklasifikasi jawaban responden dalam bebagai ketegori sesuai data yang diperlukan agar mempermudah dalam menganalisis.

1. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang di peroleh sebelumnya untuk mencegah kesalahan dalam pengumpulan data serta agar lebih memperjelas kevalidannya.

Untuk tahap selanjuanya adalah analisis dimana peneliti menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari data analisa yang dilakukan atas dasar kualitatif.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

1. **Gambaran Umum Pengadilan Agama Bitung**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bitung, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Oleh karena itu peneliti akan memberikan gambaran Umum mengenai lokasi penelitian.

1. Sejarah Pengadilan Agama Bitung

Segala sesuatu pasti memiliki kisah sejarahnya masing-masing begitu pula dengan Pengadilan Agama Bitung. Sejarah terbentuknya Kota Bitung, maka eksistensi Pengadilan Agama Bitung adalah merupakan konsekuensi logis dari beralihnya status Bitung sebagai Kotamadya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1990 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1990. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa : Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

Namun demikian Pembentukan Pengadilan Agama Bitung tidak tejadi dengan serta merta akan tetapi melalui proses yang cukup panjang / lama karena Pengadilan Agama Bitung baru terbentuk setelah 6 tahun dibentuknya Kotamadya Bitung yaitu pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada bulan Agustus Adapun Pengadilan Agama bagi orang-orang Islam di Bitung dahulunya diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Manado. Pengadilan Agama Bitung dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1996, sedangkan Sekretariat Pengadilan Agama Bitung dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 210 tahun 1997 dan Pembentukan Kepaniteraan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/025/SK/1997.

Seiring terbentuknya Pengadilan Agama Bitung tahun 1996, diangkat pula Bapak Drs. Yusuf Bukhari, SH sebagai Ketua Pengadilan Agama Bitung yang pertama. Dengan segala keterbatasan Ketua PA Bitung bersama seluruh jajarannya terus berbenah untuk membangun PA Bitung menjadi lebih baik demi menciptakan kenyamanan dan pelayanan bagi Para Pencari Keadilan.

Pada tahun 2005 PA Bitung telah mendapat fasilitas perkantoran yang cukup memadai ditandai dengan peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 28 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL.

Itulah sejarah singkat PA Bitung dan perjalanan Pengadilan Agama Bitung dari masa ke masa.[[45]](#footnote-45)

1. Alamat Pengadilan Agama Bitung.

Tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Bitung beralamat di Jln. Stadion 2 Saudara, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

1. Strukrural Kepegawaian Pengadilan Agama Manado
2. **Pimpinan**

Ketua : Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H

Wakil : Masita Olii, S.HI

1. **Hakim**

Hakim : Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim : Hizbuddin Maddatuang, SH., M.H

Hakim : Nurafni Anom, S.HI

1. **Kepaniteraan**

Panitera : Drs. Subardi Mooduto

Panmud Hukum : Hanafie Pulukadang, S.Ag

Panmud Gugatan : Surianto Mahmud, BA

Panmud Permohonan : Jane, SH

Jurusita Pengganti : Chairul Amri, ST

Fadly Ratuwalangon

1. **Kesekretariatan**

Sekretaris : Irma Tadju, S.HI

Kasubag Umum &

Keuangan : Shintia Dewi Mandulangi, S.E

Kasubag Kepeg &

Ortala : Fitriani Lundeto, S.HI

Kasubag Perencananan

Pelaporan & IT : Nurdiana Ode, S.HI

Bendahara : Chairul Amri, ST[[46]](#footnote-46)

1. **Proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bitung**

Terbentuknya Lembaga Pengadilan merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang ada pada masyarakat secara damai dan adil. Proses berperkara di pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya secara cepat, sederhana dan murah.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah diatur bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.

pelaksanaan mediasi sangatlah penting karena manfaatnya yang begitu banyak misalnya pada perkara perceraian dimana kebahagiaan seorang anak dipertaruhkan, sehingga mediasi merupakan salah satu bentuk penyadaran kepada para pihak yang akan melakukan perceraian.[[47]](#footnote-47)

Menurut pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa memalui mediasi.

Pengadilan agama bitung dalam proses pelaksanaan mediasinya sudah sesuai dengan peraturan dari PERMA karena jika tidak melaksanakan perkara akan batal demi hukum[[48]](#footnote-48)

Alur proses mediasi di Pengadilan Agama Bitung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1. Pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama Bitung (namun ada beberapa pihak yang membuat gugatan di proses pendaftaran ini karena ketidaktahuan mereka dan Pengadilan Agama Bitung tetap berupaya melayani pihak dengan sebaik mungkin).
2. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung
3. Sidang pertama, hakim pemeriksa wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
4. Pemilihan mediator:
5. Penunjukan Mediator atas dasar kesepakatan para pihak
6. Penunjukan Mediator oleh Hakim Ketua Majelis
7. Penyerahan resume perkara kepada mediator
8. Proses mediasi, berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Dapat diperpanjang selama 30 hari dan berdasarkan permintaan para pihak kepada hakim pemeriksa dapat diperpanjang lagi.
9. Laporan hasil mediasi, yakni mediator membuat laporan secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang terdiri dari:
10. Mediasi berhasil
11. Mediasi berhasil sebagian
12. Mediasi tidak berhasil
13. Mediasi tidak dapat dilaksanakan
14. Majelis hakim pemeriksa perkara:
15. Mediasi berhasil
16. Akta perdamaian
17. Penetapan tentang pencabutan gugatan
18. Mediasi berhasil sebagian
19. Akta perdamaian *(acta van dading)* yakni kesepakatan perdamaian antara sebagian pihak yang berperkara dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.
20. Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara.
21. Mediasi tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan
22. Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung pada praktiknya sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua perkara yang ada di pengadilan Agama Bitung telah dimediasi terlebih dahulu, namun dalam buku induk register perkara ada beberapa perkara yang tidak di mediasi. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu Masita Olii menyatakan bahwa perkara tanpa melalui proses mediasi biasanya karena diputus verstek, tanpa kehadiran pihak tergugat.[[49]](#footnote-49)

1. **Faktor Penghambat serta Gagalnya Proses mediasi**

Pelaksanaan mediasi tidaklah selalu berjalan dengan mulus ada kalanya faktor-faktor yang menhambat pelaksanaan mediasi.

Pelaksanaan mediasi dipengadilan agama bitung pasti memliki hambatan yang pada umumnya ketidak hadiran para pihak dan dalam prosesnya banyak para pihak yang bermediasi tidak memiliki ego masing-masing.[[50]](#footnote-50)

Hasil dari observasi ini peneliti menemukan bahwa mediasi akan memiliki faktor penghambat hingga menjadi kegagalan, faktor penghambatnya yaitu[[51]](#footnote-51):

1. Ketidakhadiran Para Pihak

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran juga akan menentukan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para pihak/salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.

1. Melewati Batas Waktu

Hal lain yang dapat menyebabkan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan adalah karena batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan PERMA terlewati. Dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa:

“Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.”

Kemudian dalam Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

PERMA telah mengatur waktu pelaksanaan mediasi dengan sangat teliti. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan, bahwa jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan damai di pengadilan tingkat pertama, maka pada proses upaya hukum para pihak masih bisa meminta waktu kembali untuk melakukan proses mediasi, misalnya pada saat pemeriksaan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, para pihak masih bisa mengajukan waktu lagi melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.

1. Proses Mediasi Dengan Itikad Tidak Baik

Proses pelaksanaan mediasi harus dilakukan dengan itikad baik agar bisa mencapai kesepakatan perdamaian, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses pelaksanaan mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggaran terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasinya dapat dinyatakan gagal, baik atas usulan dari salah satu pihak manapun atas prakarsa mediator.

1. Adanya Kurang Pihak

Proses perdamaian di mediasi pada prinsipnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang memiliki sifat mengakhiri perkara, sehingga dalam proses perdamaian harus melibatkan keseluruhan pihak yang terkait dengan sengketa yang diperdamaikan agar setelah hasil kesepakatan itu dikuatkan menjadi akta perdamaian tidak akan timbul sengketa baru di kemudian hari karena terdapat pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut. Jika dalam proses perdamaian terdapat pihak-pihak yang seharusnya terlibat, namun ternyata tidak turut dilibatkan maka proses perdamaian tersebut menjadi kurang pihak.

1. Syarat Kesepakatan Damai Tidak Terpenuhi

Seorang mediator memiliki kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak sebelum kesepakatan itu diajukan kehadapan Hakim Pemeriksa Perkaranya untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi kesepakatan damai tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam menyepakati kesepakatan damai tersebut, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasinya telah gagal.

Menurut Ibu Masita Olii dan Ibu Asmawati Sarib sebagai hakim dan mediator menyatakan faktor utama yang menghambat proses mediasi di pengadilan yaitu:

1. Faktor penghambat dan gagalnya mediasi di sebabkan ketidak hadiran para pihak untuk menghadiri proses mediasi, kemudian dalam Perma No 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak untuk hadir dalam mediasi namun dapat di mengukuasakan ke pengacara hal ini merupakan sebuah celah untuk ketidak inginan para pihak untuk berdamai.
2. Faktor berikutnya yang menghambat dan menggagalkan mediasi yaitu ego, ego yang dimaksud yaitu para pihak merasa hak mereka lebih penting dari yang lainnya sehingga menutup rasa ingin berdamaianya.

Kesulitan untuk berdamai oleh para pihak di Pengadilan Agama Bitung dilatarbelakangi oleh faktor ego belaka. Kadang persoalan harga diri para pihak menjadi benteng yang kokoh untuk enggan memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi. Contohnya saja masalah perceraian yang sebenarnya pemasalahan hanyalah sederhana namun ego yang begitu kuat sehingga para pihak tidak lagi memikirkan akibat perceraian terhadap anak.[[52]](#footnote-52)

Meskipun banyak manfaatnya dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada realitanya tingkat keberhasilan lembaga di peradilan masih sangat rendah. Banyak faktor yang menghalangi keberhasilan dalam mencapai kesepakatan, misalnya: karena sengketa maupun percerian para pihak dilandasi oleh permasalahan emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak untuk membentuk forum komunikasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian

1. **Tingkat Keberhasialan Mediasi Di Pengadilan Agama Bitung.**

Pada intinya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator mencari tau dan menagkap keinginan para pihak. Katakanlah para pihak ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau berdamainya itu seperti apa. Maka disinilah mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian memberikan penawaran solusi. Jikah solusi tersebut diterima para pihak hal tersebut berpeluang meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi. Tapi persoalan berhasil dan tidaknya tetap dikembalikan pada niat para pihak itu sendiri. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun khasanah untuk berdamai.

Jika mediasi berhasil berarti ada kesepakatan yang di ambil para pihak, penggugat mengeluarkan apsi solusi begitu juga dengan tergugat, jika perundingan berhasil maka kesepakatan para pihak kemudian dibaut dalam akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat para pihak selanjutnya dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim yang kemudian dikuatkan dalam putusan. Persidangan tidak akan dilanjutkan lagi, tidak ada pembuktian, jadi mediator menyampaikan bahwa mediasi berhasil dan telah selesai, hakim memeriksa dan disidang selanjutnya langsung diputuskan maka perkara akan selesai. Sedangkan apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim.

Tabel 1

Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Agama Bitung Tahun 2019



*Sumber data: Pengadilan Agama Bitung*

Pada tabel diatas, perkara yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 46 perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 5 dan yang tidak berhasil berjumlah 41 perkara. Menurut peneliti peluang keberhasilan penyelesaian perkara secara mediasi sangat lah kecil, hal ini masih jauh dari harapan PERMA No 1 tahun 2016 yang ingin menyelesaikan permasalahan secara damai *win win solution* tanpa melanjutkan ke jenjang persidangan yang dimana yang hanya menghasilkan menang atau kalah *win or lose.* Menurut ketua Pengadilan Agama Bitung hambatan paling terbesar yang di hadapi dalam proses mediasi untuk mencapai perdamaian karena tidak adanya itikat untuk bedamai.

**Grafik 1**

Jenis Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Agama Bitung Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa jenis perkara yang paling yang banyak ditangani pengadilan agama bitung adalah perkara perceraian berjumlah 42 kasus dan yang berhasil hanya bejumlah 6 kasus yang gagal 36 kasus, untuk waris berjumlah 3 kasus dan semuanya gagal, dan harta bersama 1 kasus dan itupun tidak berhasil .

Ibu Nurafni Anom mengatakan pada perkara perceraian mediator harus sebisa mungkin untuk mencairkan suasana agar para pihak yang akan bercerai mampu berpikir jernih dan mempertimbangkan keputusan mereka.[[53]](#footnote-53)

Berdasarkan semua kasus yang masuk dan di mediasi di Pengadilan Agama Bitung hanya 13,04 persen yang berhasil dan 86,96 persen yang gagal. Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi itu salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan.

Ibu Masita Olii mengatakan selain kurang kuatnya itikat baik para pihak untuk berdamai juga di pengaruhi oleh kurangnya hakim bersertifikat mediator sebagai salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan peluang keberhasilan mediasi di mediator. Hakim bersertifikat mediator di Pengadilan Agama Bitung hanyalah Ketua Pengadilan Agama Bitung yaitu Bapak Amran Abbas.

**Grafik 2**

Penagangan Mediasi Setiap Hakim Mediator

Pada tabel diatas menggambarkan jumlah perkara mediasi setiap Hakim Mediator dimana Bapak Amran Abbas adalah salah satu hakim yang tingkat mediasinya tebanyak secara jumlah, saat peneliti mewawancarai Ibu Masita Olii mengenai mengapa jumlah perkara mediasi Bapak Amran Abbas lebih banyak di tangani apa karena beliau bersrtifikasi atau ada alasan lain?, Ibu Masita Mengatakan mengatakan bahwa penyebab perkara mediasi Bapak Amran Abbas dan saya karena hakim lain sedangkan hakim lain sedang melakukan persidangan.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Tingkat Mediasi Di Pengadilan Agama Bitung, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung secara umum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke pengadilan Agama Bitung akan dimediasi terlebih dahulu dan apabila perkara tidak dimediasi maka putusan dianggap batal demi hukum.
2. Proses mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika ego pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya serta kepentingan bersama. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak diakibatkan oleh ego yang lebih mengutamakan hak pribadi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu keterbatasan mediator yang bersertifikat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung dari segi hasil masih sangat rendah dikarenakan banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi. Namun dari segi prosedur, mediasi telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Bitung maka mediasi pun dikatakan berhasil karena telah sesuai ketentuan dimana semua perkara wajib harus di mediasi. Kemudian persoalan berhasil atau gagalnya dikembalikan kepada niat pencari keadilan.
3. **Saran**
4. Diperlukan adanya penyuluhan atau sosialisasi kemasyarakat sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 agar mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.
5. Kepada para Hakim dan Mediator agar mengingatkan para pihak yang bersengketa untuk bisa lebih mementingkan keuntungan bersama dari pada diri sendiri dalam proses mediasi. Dengan hal ini untuk lebih dioptimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang mengasilkan kesepakatan perdamaian para pihak seperti memberikan mediator yang teruji agar meningkatkan keberhasilan dari mediasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abbas Syahril, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010).

Ali Achmad, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004)

Amriani Nurnaningsih, *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan* (Cet.1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

Emerzon Joni, *Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Fuller Lon dapat dilihat dalam Leonard R. Riskin, *Dispute Resolution and Lowyers*, *Abridged Edition*, (St. Paul Minm : West Publishing.Co, 1987)

Goopaster Garry, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Perkara Melalui Negosiasi* (Jakarta : ELIPS Project, 1993).

Harun Badriyah, *Prosedur Gugatan Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

http://pa-bitung.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-bitung

<http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/49>

http://repository.unimal.ac.id/

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/search>

https://www.kbbi.web.id/

Kamuji, “Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata” *Jurnal Ummul Qura* Vol VII, Nomor 1 (Maret 2016)

Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

Nugroho Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2: 2011).

Rahmadi Takdir, *Mediasi penyelesaian perkara melalui pendekatan mufakat,* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011)

Santoso Mas Achmad dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian,* Mahkamah Agung RI, (Jakarta: 2003)

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,* (Jakarta: Sinar Grafika,2011).

Satori Djam’an dan Aan Komariah, *Metodolgi Penelitian Kualitatif* (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2014)

Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,* cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017).

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Syafa’at Rachamd, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang,Konsep dan Implementaasinya,*(Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006 ).

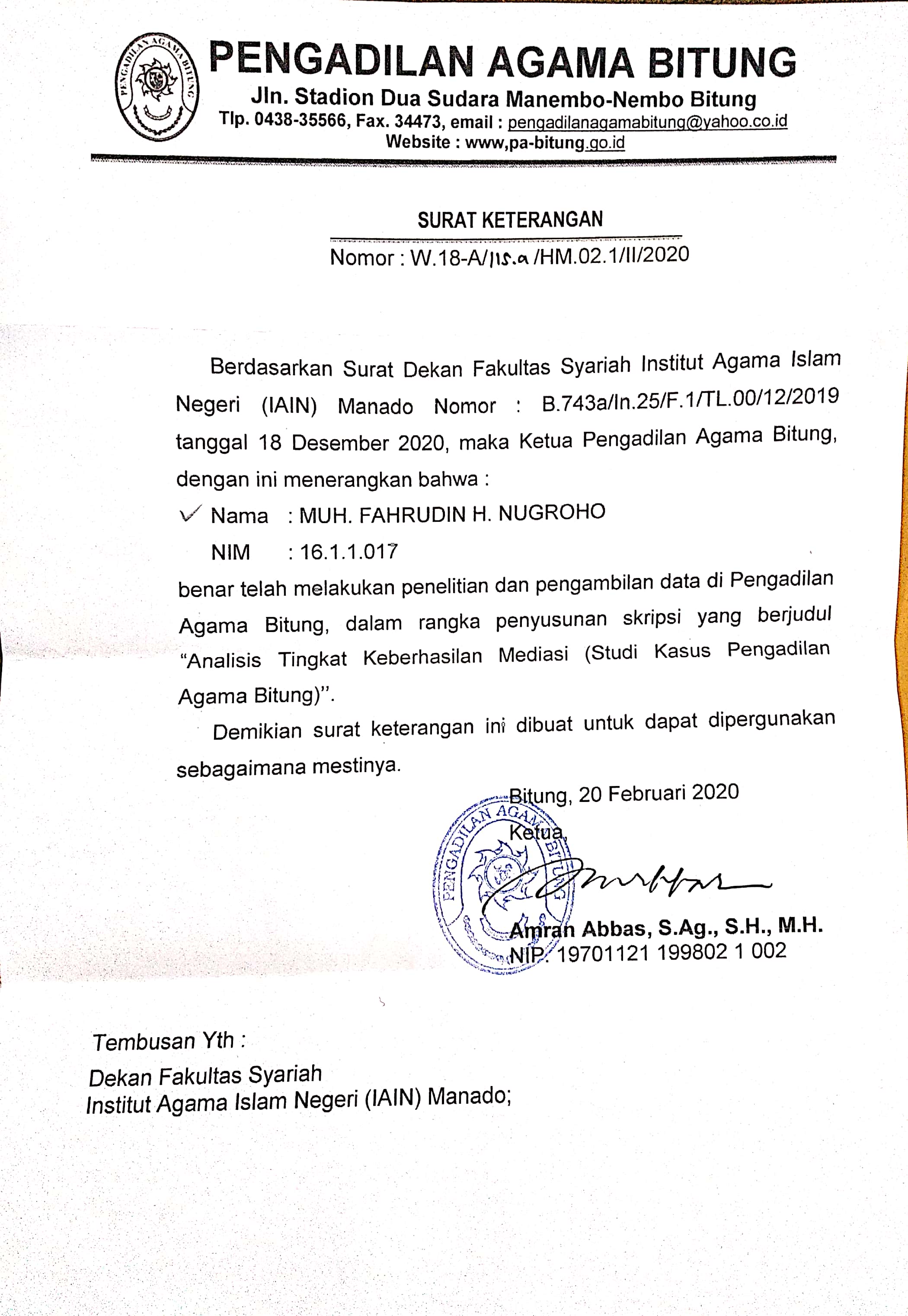
Tim Viva Justicia,Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, (Yogyakarta:Genesis Learning,, Cet. 1, 2017).

Ubadillah Wildan, *“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang”.* Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim, 2014)

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis,* Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2010).

Witanto D. Y, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan* *Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan,* *Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)



**Foto Gedung Pengadilan Agama Bitung**

Gambar Area Depan Gedung Pengadilan Agama Bitung

Gambar Area Luar Gedung Pengadilan Agama Bitung

Gambar Dalam Gedung Tempat Penerimaan Perkara Pengadilan Agama Bitung

**Foto Bersama Hakim Sebagai Narasumber**

Wawancara Dengan Ibu Nurafni Anom selaku Hakim Pengadilan Agama Bitung Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Pengadilan Agama Bitung

Wawancara Dengan Ibu Masita Olii selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Pengadilan Agama Bitung

Wawancara Dengan Bapak Amran Abbas selaku Ketua Pengadilan Agama Bitung Pada Tanggal 13 Februari 2020, di Pengadilan Agama Bitung

****

Wawancara Dengan Ibu Asmawati Sarib selaku Hakim Pengadilan Agama Bitung Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Pengadilan Agama Bitung

Wawancara Dengan Bapak Hizbuddin Maddatuang selaku Hakim Pengadilan Agama Bitung Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Pengadilan Agama Bitung

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muh Fahrudin H Nugroho

NIM : 16.1.1.017

Tempat & Tanggal Lahir : Klaten, 05-12-1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Email : muhfahrudinhn@gmail.com

Alamat : RT/RW 015/004, Kel Pakadoodan, Kec Maesa, Kota Bitung.

Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Al-Syakhsiyyah

Tahun Ajaran : 2016-2020

Nama Orang Tua

* 1. Ayah : Agus Nugroho Mulyono
  2. Ibu : Sri Rahayem

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Arafah Kadoodan (2003-2004)
2. SD : SDN Inpres 6/75 Madidir (2004-2010)
3. SMP : SMP Muhammadiyah (2010-2013)
4. SMA/SMK : SMA N 2 Bitung (2013-2016)

1. Nurnaningsih Amriani, *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan* (Cet.1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. D. Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan* *Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 1-2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dikutip dari [*http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/49*](http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/49) di akses pada hari selasa Pukul: 09:23 tanggal 31 desember 2019. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, huruf a. [↑](#footnote-ref-4)
5. Syahril Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 301. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,* (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h. 159. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, bab I, Pasal 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2: 2011), h. 183 [↑](#footnote-ref-8)
9. Dikutip dari [https://*digilib.uns.ac.id/dokumen/search*](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/search)di akses pada hari kamis tanggal 18 desember 2019. [↑](#footnote-ref-9)
10. Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 30. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 2. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) [*https://www.kbbi.web.id/analisis*](https://www.kbbi.web.id/analisis)diakses pada Pukul: 10:11 WITA Rabu 1 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-12)
13. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) [*https://www.kbbi.web.id/tingkat*](https://www.kbbi.web.id/tingkat) diakses pada Pukul: 10:11 WITA Rabu 1 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-13)
14. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) [*https://www.kbbi.web.id/keberhasilan*](https://www.kbbi.web.id/keberhasilan)diakses pada Pukul: 10:11 WITA Rabu 1 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-14)
15. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) [*https://www.kbbi.web.id/berhasil*](https://www.kbbi.web.id/berhasil)diakses pada Pukul: 10:11 WITA Rabu 1 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) [*https://www.kbbi.web.id/mediasi*](https://www.kbbi.web.id/mediasi)diakses pada Pukul: 10:12 WITA Rabu 1 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-16)
17. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*, h. 2 [↑](#footnote-ref-17)
18. Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Perkara Melalui Negosiasi* (Jakarta : ELIPS Project, 1993), h. 201. [↑](#footnote-ref-18)
19. Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 69. [↑](#footnote-ref-19)
20. Rachamd Syafa’at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang,Konsep dan Implementaasinya,*(Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006 ), h. 3. [↑](#footnote-ref-20)
21. Tim Viva Justicia,Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, (Yogyakarta:Genesis Learning,, Cet. 1, 2017), h. 567 [↑](#footnote-ref-21)
22. Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian perkara melalui pendekatan mufakat,* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 154-159. [↑](#footnote-ref-22)
23. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 28-30. [↑](#footnote-ref-23)
24. D. Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan* *Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. h 22-23 [↑](#footnote-ref-24)
25. D. Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan* *Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 27-29. [↑](#footnote-ref-25)
26. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis,* Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2010), h. 34. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sulaiman, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, diakses pada hari Rabu tanggal 15 April 2020. [↑](#footnote-ref-27)
28. D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan* *Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 88 [↑](#footnote-ref-28)
29. Lihat Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-29)
30. Mas Achmad Santoso dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian,* Mahkamah Agung RI, (Jakarta: 2003) h. 23 [↑](#footnote-ref-30)
31. Lon Fuller dapat dilihat dalam Leonard R. Riskin, *Dispute Resolution and Lowyers*, *Abridged Edition*, (St. Paul Minm : West Publishing.Co, 1987), h. 95 [↑](#footnote-ref-31)
32. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 136. [↑](#footnote-ref-32)
33. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan,* *Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 241. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kamuji, “Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata” *Jurnal Ummul Qura* Vol VII, Nomor 1 (Maret 2016). h 41 [↑](#footnote-ref-34)
35. Wildan Ubadillah, *“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang”.* Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim, 2014). h. 25-26. [↑](#footnote-ref-35)
36. Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), h. 25 [↑](#footnote-ref-36)
37. Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,* cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.139 [↑](#footnote-ref-37)
38. Wildan Ubadillah, *“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang”.* h. 33 [↑](#footnote-ref-38)
39. Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9. [↑](#footnote-ref-39)
40. Sugiono, *Memahami Penelitian,* h. 145. [↑](#footnote-ref-40)
41. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h.72 [↑](#footnote-ref-41)
42. Sugiono, *Memahami Penelitian,* h. 245 [↑](#footnote-ref-42)
43. Sugiono, *Memahami Penelitian,* h. 246 [↑](#footnote-ref-43)
44. Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodolgi Penelitian Kualitatif* (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 219 [↑](#footnote-ref-44)
45. Dikutip dari [*http://pa-bitung.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-bitung* Diakses pada pukul 12:09](http://pa-bitung.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-bitung%20%20Diakses%20pada%20pukul%2012:09) WITA Senin 25 Mei 2020 [↑](#footnote-ref-45)
46. Dikutip dari [*http://pa-bitung.go.id/pages/struktur-pengadilan-agama-bitung*](http://pa-bitung.go.id/pages/struktur-pengadilan-agama-bitung) diakses pada pukul 12:21 WITA Senin 25 Mei 2020 [↑](#footnote-ref-46)
47. Amran Abbas, Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 13 Februari 2020 [↑](#footnote-ref-47)
48. Nurafni Anom, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 12 Februari 2020 [↑](#footnote-ref-48)
49. Masita Olii, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 12 Februari 2020 [↑](#footnote-ref-49)
50. Hizbuddin Maddatuang, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 12 Februari 2020 [↑](#footnote-ref-50)
51. D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan* *Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* h. 204-212 [↑](#footnote-ref-51)
52. Masita Olii, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara* [↑](#footnote-ref-52)
53. Nurafni Anom, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara* [↑](#footnote-ref-53)